

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM PIKIRAN DAN PRAKTIK KELOMPOK KEAGAMAAN ISLAM DI JAYAPURA

RELIGIOUS HARMONY IN THE THOUGHT AND PRACTICE OF ISLAMIC RELIGIOUS GROUPS IN JAYAPURA

Sabara

Balai Litbang Agama Makassar, Indonesia
barackfilsafat@yahoo.co.id

Elce Yohana Kodina

Balai Litbang Agama Makassar , Indonesia
yohanaaisya@gmail.com

Artikel diterima 10 November 2020, diseleksi 22 November 2020, dan disetujui 12 Desember 2020

Abstract

This research is intended to understand the perspective and practice of religious harmony among Islamic groups in City and Regency of Jayapura, Papua Province. The ideas and practice of harmony is placed in a social, cultural, political, and economic context. Research using qualitative approaches, interviews and observations became the main instruments in research. The results showed the ideas of Islamic groups towards religious harmony was built through the process of meeting interactions in plural social spaces and intensive interactions to positive effects by Muslims to other religions, especially Christians. The principle that builds the ideas of religious harmony from Islamic groups is the principle of moderation and inclusion of Islam in building interactions with adherents of other religions that conform to the vision of Islam as rahmatan lil alamin religion. The practice of religious harmony displayed by Islamist groups in Jayapura is a reflection of their moderate vision of Islam in the form of an active tolerance through intensive dialogue and cooperation especially in religious celebrations.

Keywords: Religious Harmony, Islamic Groups, Socio-religious interactions

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami perspektif dan praktik kerukunan umat beragama (KUB) di kalangan kelompok-kelompok Islam di Kotadan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Gagasan dan praktik kerukunan tersebut diletakkan dalam konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara dan observasi sebagai instrumen utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan kelompok-kelompok Islam mengenai KUB dibangun melalui proses interaksi melalui dialog dalam ruang sosial yang plural dan melalui interaksi intensif yang menimbulkan kesan-kesan positif dari umat Islam kepada umat agama lain, khususnya umat Kristiani. Prinsip yang membangun gagasan KUB dari kelompok-kelompok Islam tersebut adalah prinsip moderasi dan inklusivisme Islam dalam berinteraksi dengan penganut agama lain yang sesuai dengan visi Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*. Praktik KUB yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok Islam di Jayapura merupakan refleksi dari visi keislaman mereka yang moderat dalam bentuk sikap toleransi aktif melalui dialog dan kerjasama yang intensif terutama dalam perayaan-perayaan keagamaan.

Kata Kunci: Kerukunan.Umat Beragama, Kelompok Islam, Interaksi sosial-keagamaan

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama (KUB) mencerminkan harmoni relasi yang damai dan baik antar penganut agama yang berbeda. Lebih dari itu, KUB pun meliputi jalinan relasi yang baik antara kelompok pada internal sebuah agama, dan bagaimana umat beragama tersebut membangun hubungan nan harmonis kepada pemerintah (tri kerukunan umat beragama) (Iskandar, 2005). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengatur KUB sebagai relasi antar umat beragama yang didasarkan pada toleransi, saling menghormati, saling pengertian, penghargaan akan kesetaraan dalam mengamalkan ajaran agamanya serta kerjasama yang aktif pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sabara, 2018). Kelompok keagamaan merupakan sumber daya utama dalam membangun kerukunan pada tiga dimensi KUB tersebut. Hubungan harmonis antar kelompok agama baik internal maupun eksternal menjadi salah satu penentu terwujudnya KUB. Sebagai bagian dari kelompok sosial, kelompok agama memiliki peran signifikan bagi anggota kelompoknya pada aspek sosial-keagamaan mereka. Termasuk dalam memantik peran anggota kelompok tersebut untuk mencipta serta memelihara kehidupan keagamaan yang rukun dan damai intern maupun ekstern (Muchtar, 2013).

Hal ini menjadi penting, karena kelompok agama selaku bagian dari kelompok sosial, menjadi wadah dari dilangsungkannya berbagai kegiatan sosial-keagamaan bagi anggotanya. Sebagai sebuah komunitas, anggota yang berhimpun dalam sebuah kelompok agama tertentu diikat oleh solidaritas yang didasarkan pada visi bersama yang berbasis kesamaan teologi. Menurut

Mashadi (2014), supaya agama bisa fungsional sebagai alat perekat kohesi sosial terdapat beberapa aspek yang mesti diperhatikan oleh pemeluknya. Antara lain; hilangnya ego sektoral kelompok, tak bersikap ekstrem serta saling menghormati, dan hadirnya kesadaran komunal dalam satu kesatuan masyarakat walau dilingkupi beragam perbedaan. Hal tersebut sangat dipengaruhi perspektif serta praktik yang ditunjukkan oleh suatu kelompok agama kepada kelompok agama lainnya.

Kebijakan moderasi beragama yang menjadi agenda utama Kementerian Agama menjadikan toleransi sebagai salah satu indikatornya (Kementerian Agama RI, 2019). Michael Walzer (dalam Fauzi, 2007) memaparkan lima matra toleransi: *Pertama*, penerimaan terhadap perbedaan untuk hidup damai yang bermakna sebatas penerimaan yang pasif terhadap perbedaan demi perdamaian setelah sebelumnya saling membantai. *Kedua*, ketakpedulian yang lunak terhadap perbedaan, di mana kelompok lain diakui ada, namun eksistensinya tak bermakna apa-apa. *Ketiga*, hadirnya pengakuan secara prinsip tentang kelompok lain yang juga punya hak-haknya sendiri meski untuk mengekspresikannya belum tentu disetujui. *Keempat*, tak hanya sekadar menunjukkan pengakuan, namun keterbukaan pada kelompok lain atau paling tidak keingintahuan untuk lebih bisa memahami kelompok lain tersebut. *Kelima*, toleransi tak hanya sekadar keterbukaan maupun pengakuan untuk menerima kelompok lain, tapi ikut mendukung, merawat, bahkan merayakan perbedaan. Menurut Fadl (2003) pandangan Islam mengenai toleransi tidak sekadar menerima kenyataan perbedaan yang ada, namun Al-Qur'an sangat mendukung etika dalam perbedaan dan toleransi. Rentannya agama sebagai faktor pemantik konflik, oleh karena itu, KUB merupakan hal yang krusial demi terwujudnya integrasi

dan harmoni dalam hubungan sosial masyarakat yang plural. Seperti yang dikatakan oleh mantan Menteri Agama, KH. Muhamamd Dachlan (dalam Muhdina, 2015) harmoni di antara kelompok agama menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya stabilitas ekonomi dan politik. Berbagai pendekatan dapat dilakukan dalam membangun KUB, baik pendekatan struktural maupun kultural. Pendekatan kultural menjadi urgen, dikarenakan secara fungsional nilai-nilai kearifan lokal baik berupa tradisi ataupun norma-norma sosial yang ada di masyarakat bisa memperkuat sistem kultur yang kemudian dipercaya serta diakui sebagai variabel penting hingga dapat memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat (Sabara, 2016).

Pebedaan agama tidak pernah menjadi penyebab konflik berkepanjangan di Papua, jikapun ada konflik lebih disebabkan masalah ekonomi dan politik (Ridwan, 2018). Dalam survei indeks KUB yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Kagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Indeks KUB Provinsi Papua selalu berada di atas rata-rata indeks nasional. Indeks KUB nasional 2019 adalah 73,83, sedangkan indeks KUB Papua 79,00. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 74,80 yang juga di atas indeks KUB nasional, yaitu 70,90. Salah satu lokasi pengambilan sampel dalam survei tersebut untuk Provinsi Papua adalah Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi.

Kota Jayapura merupakan kota dengan tingkat pluralitas yang tinggi baik etnik, budaya, maupun agama. Pluralitas agama di Kota dan Kabupaten Jayapura tak hanya dari keragaman agama, namun dalam internal masing-masing agama pun banyak kelompok keagamaan yang tumbuh dan berkembang, khususnya pada agama Islam dan Kristen selaku dua agama besar di Kota Jayapura. Kelompok-

kelompok keagamaan tersebut menjadi *resources* utama guna membangun harmoni KUB di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Penelitian ini kemudian fokus pada *resources* kelompok Islam terhadap KUB dengan fokus permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi dan praktik KUB kelompok Islam? Bagaimana praktik KUB dari kelompok-kelompok Islam dalam hal sosial, budaya, politik, ekonomi, dan agama?. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan model dalam membangun KUB di wilayah lain khususnya yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang serupa.

METODE

Penelitian berjenis kualitatif-deskriptif, dan kelompok keagamaan Islam sebagai subyek penelitian dan unit analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pemilihan informan berasal dari tokoh setiap kelompok keagamaan Islam, pengurus FKUB, pejabat Kementerian Agama, dan pemerintah daerah baik kota, kabupaten, maupun provinsi. Informan tersebut dipilih secara *purposive* (lihat Kasniyah, 2012). Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas antarumat beragama serta kegiatan keagamaan yang bernuansa KUB di Kota dan Kabupaten Jayapura (selanjutnya disebut Jayapura saja). Studi dokumen atas referensi terkait dari jurnal, buku, berita maupun data-data statistik yang terkait tema penelitian. Penelitian dilakukan di Jayapura dengan waktu pengumpulan data selama 25 hari yang dibagi dalam dua tahapan. Tahapan pertama atau studi awal selama tujuh hari pada 21-27 Februari 2018 dan tahap pengumpulan data lapangan selama 15 hari pada 8-25 Maret 2018.

PEMBAHASAN

Jayapura Dalam Perspektif Sosio-Religi

Total penduduk Kota Jayapura pada 2017 menurut BPS Kota Jayapura sebanyak 644.652 jiwa dengan komposisi 65,09% penduduk non Papua dan 34,01% penduduk asli Papua. Penduduk asli Kota Jayapura tersebar di 14 kampung dengan suku dominan adalah suku Numbai dan Anafri. Penduduk Kabupaten Jayapura menurut BPS Kabupaten Jayapura berjumlah 122.848 jiwa dengan komposisi 38,52% pendatang dan 61,48% penduduk asli Papua. Lebih 30% penduduk Kabupaten Jayapura bermukim di Distrik Sentani dan menjadi distrik paling heterogen dan merupakan "miniatur" Indonesia. Penduduk asli Kabupaten Jayapura terdiri atas suku-suku yang tergabung dalam wilayah adat Sentani.

Migrasi pendatang ke wilayah Papua (khususnya Jayapura) ketika Papua menjadi bagian dari Hindia Belanda. Migrasi ini pun berkaitan dengan sistem pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengambil beberapa tenaga administrasi dari Ambon, Kei, dan Minahasa (Melerey, 2012). Mulai saat itu pula, agama menjadi isu cukup sentral. Pada periode ini, Kristen menyebar dengan sangat masif, di mana perkembangannya bukan hanya di pusat-pusat perkotaan, melainkan juga naik ke gunung-gunung. Migrasi terbesar dan hingga kini memunculkan banyak problem adalah sejak Papua secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1969. Pemerintah Indonesia mengirim banyak sekali pegawai pemerintahan dari wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat (Maluku, Sulawesi, dan Jawa) dan program transmigrasi yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Migrasi ini berakibat pula pada dinamika ekonomi Papua (khususnya di perkotaan), di mana banyak migran yang melakukan perdagangan di Papua (Afwan, 2015).

Membaca konteks sosio-kultural Jayapura terkait dengan orang asli Papua dan pendatang, menurut Dr. Hafid Yusuf -Sekjen YAPIS Papua dan Kepala Kemenag Kota Jayapura- (wawancara, Abepura 23/02/2018), penduduk Jayapura harus dibagi ke dalam tiga kategori; orang Papua asli, pendatang yang lahir atau besar di Papua, dan pendatang yang belum lama bermigrasi ke Papua. Untuk penduduk kategori pertama dan kedua secara sosio-kultural telah "lebur" dalam akulturasi sosio-kultural dan membentuk sebuah sosio-kultur baru sebagai hasil pertemuan ragam budaya lokal Papua dan heterogenitas budaya penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang lahir atau besar di Papua telah mengalami proses enkulturasi Papua sehingga secara sosiologis merasa sebagai "orang Papua" dan oleh orang asli Papua mereka disebut sebagai "Papua lurus" untuk membedakan dengan penduduk asli Papua yang menyebut diri "Papua keriting". Penduduk kategori ketiga yang bisaanya belum lama menetap di Papua inilah yang kerap menjadi pemicu patologi sosial di Papua baik karena faktor ekonomi maupun faktor sosial lainnya. Tak bisa dipungkiri ada sebagian orang asli Papua yang memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap identitas ke-Papua-an mereka, namun kelompok ini hanyalah sebagian kecil dari orang asli Papua. Secara umum, orang asli Papua adalah orang yang bersikap terbuka terhadap pendatang dari luar Papua.

Agama merupakan bagian penting pada sistem sosio-kultural masyarakat Papua yang didasarkan pada prinsip "tiga tungku satu batu", yaitu "tungku" pemerintah, adat, dan agama (Wally, 2018). "Tiga tungku" juga biasa diasosiasikan dengan tiga agama; Islam, Kristen, dan Katolik. Secara sosio-keagamaan, Kota Jayapura adalah ruang perjumpaan dua agama besar (Kristen dan

Islam) yang keduanya hampir memiliki jumlah penganut yang berimbang. Menurut data BPS Kota Jayapura, umat Kristen populasinya 44,57% sedangkan umat Islam 39,91% dari penduduk Kota Jayapura. Penganut Katolik 13,26%, Hindu dan Buddha masing-masing 0,33% dan 0,37%. Sedangkan di Kabupaten Jayapura menurut data BPS, umat Kristen populasinya 65,45%, Muslim 29,28%, Katolik 4,94%, Hindu dan Buddha masing-masing 0,14% dan 0,23%. Distrik Sentani dan Sentani Barat sebagai pusat Kabupaten Jayapura, umat Islam dan Kristen populasinya berimbang. Bahkan di dua distrik (Namblog dan Nimbokrang) umat Islam merupakan mayoritas. Terdapat 134 masjid dan 66 mushalla di Kota Jayapura, gereja Kristen 350 buah, 14 gereja dan 22 kapel Katolik, serta lima pura dan enam vihara. Sedangkan di Kabupaten Jayapura jumlah masjid sebanyak 73 buah, gereja Kristen sebanyak 495 buah, gereja Katolik 22 buah, pura 1 buah dan vihara tidak ada.

Umat Kristen terbagi ke dalam 48 denominasi yang terdaftar di Kota Jayapura dan 39 denominasi di Kabupaten Jayapura, dengan denominasi terbesar adalah Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Kelompok keagamaan Islam terdiri atas NU dan Muhammadiyah selaku dua organisasi terbesar terdapat kelompok kecil pengikut Salafi dan Syiah. Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Thaib beraktivitas di Jayapura sejak 2015, tepatnya di wilayah Koya Distrik Muara Tami. Muslim asli Papua terdapat dalam organisasi Majelis Muslim Papua (MMP) serta Forum Komunikasi Pegunungan Tengah (FKMPT). Aktivis Muslim dari berbagai organisasi (utamanya NU dan Muhammadiyah) di Papua sejak 1968 mendiikan Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) yang khusus berkiprah di bidang pendidikan (Sabara 2018).

Relasi dan Regulasi KUB di Jayapura

Relasi antar dan inter umat beragama

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada bulan Maret 2017 merilis Indeks Kerukunan Umat Beragama 2016 dan menempatkan provinsi Papua sebagai provinsi dengan indeks kerukunan tertinggi dari 34 provinsi yang disurvei. Nilai indeks KUB Provinsi Papua adalah 75,97 Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura merupakan dua dari empat lokasi yang disurvei. Untuk wilayah Kabupaten Jayapura, pada tanggal 28 Mei 2016 dicanangkan sebagai zona integritas kerukunan. Nota kesepahaman zona integritas kerukunan yang berisi 4 poin ditandatangani oleh semua perwakilan agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, Bupati Jayapura, Gubernur Papua, dan Menteri Agama. Penandatanganan zona integritas kerukunan tersebut bersamaan dengan pembukaan dua acara penting, yaitu MTQ ke 26 Tingkat Provinsi Papua dan Pesparawi ke I Tingkat Kabupaten Jayapura. Secara simbolik di Kota Jayapura kerukunan umat beragama ditunjukkan dengan kampanye kerukunan yang dihadiri oleh semua elemen umat beragama yang dilakukan dalam rangka karnaval Desember menyambut hari raya Natal.

Secara kultural, KUB di Jayapura telah tertanam dalam batin masyarakat yang secara ekspresif ditunjukkan dengan saling mendukung dan saling menjaga dalam setiap momen peringatan hari besar agama. Pada saat peringatan Natal, pemuda muslim dari berbagai elemen OKP Islam dengan sukarela melakukan pengamanan peringatan Natal di semua gereja yang ada di Jayapura. Demikian pula ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, pemuda-pemuda Kristen yang aktif melakukan penjagaan pelaksanaan shalat Ied.

Hubungan KUB kerap terganggu oleh beberapa kasus, setidaknya lima kasus KUB dalam interval tiga tahun terakhir, bahkan empat kasus masih belum menemukan jalan penyelesaian hingga penelitian ini dilakukan. Kasus-kasus tersebut adalah; keberadaan dan aktivitas kelompok Laskar Jihad Jafar Umar Thalib di Koya Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, kasus dugaan pembakaran Alkitab oleh oknum TNI pada tanggal 25 Mei 2017 di Padang Bulan Distrik Heeram, Kota Jayapura, kasus pembangunan mushalla Pengadilan Negeri Kota Jayapura yang berlokasi di Distrik Abepura, Kota Jayapura, kasus pembangunan menara Masjid Agung al-Aqsha Sentani Kabupaten Jayapura, serta kasus terkait pernyataan sikap Persekutuan Gereja-gereja Jayapura (PGGJ) Kabupaten Jayapura berkenaan dengan hubungan antar umat beragama di Kabupaten Jayapura.

Hubungan inter umat Islam secara umum cukup bagus, hanya saja sejak dekade 2010-an dengan kemunculan beberapa kelompok Islam yang dianggap radikal dianggap sedikit mengganggu hubungan intern umat Islam. Menurut Tony Viktor Wanggai –Ketua PW NU Papua- (wawancara, Jayapura 11/03/2018), keberadaan kelompok Islam radikal seperti kelompok Salafi dan kelompok Laskar Jihad Jafar Umar Thalib (JUT) cukup mengganggu hubungan intern umat Islam. Kelompok Salafi dengan Radio Suara Qalbu (SQ) kerap memperdengarkan ceramah yang cukup keras mevonis amalan/tradisi kelompok *Nahdiyin*. Tokoh-tokoh *Nahdiyin* sempat melakukan protes ke stasiun radio tersebut. Pada bulan November 2017, Ustadz Yazid Abu Jawwas datang berdakwah ke Jayapura, setelah berceramah di Masjid Raya Jayapura, dan menurut beberapa tokoh umat Islam menganggap ceramah beliau cukup keras, setelah itu ketua MUI Papua, KH. Saiful Islam Payage mengambil langkah untuk

membatalkan jadwal ceramah beliau di beberapa masjid lainnya.

Hubungan intern umat Kristen secara umum di Jayapura cukup bagus, menurut John Marwery –Kabid Urusan Agama Kristen Kanwil Kemenag Papua- (wawancara, Jayapura, 13/03/2018) terkadang muncul konflik antar gereja dan antar denominasi disebabkan pembagian dana otonomi khusus (otsus) untuk kelompok agama, keberadaan kelompok kharismatik yang menganggap diri mereka paling suci, serta keberadaan kelompok yang dianggap sempalan Kristen, seperti Saksi Yehova, Mesianik. Hal ini tidak jarang mengganggu hubungan intern umat Kristen. Diakui oleh John Marwery permasalahan tersebut tidak pernah sampai pada konflik, namun sedikit mengganggu hubungan intern umat Kristen di Jayapura.

Pelaksanaan regulasi terkait KUB

Menurut H. Tony Wanggai dalam kapasitas selaku pengurus FKUB Provinsi Papua (wawancara, Jayapura 11/03/2018) pelaksanaan regulasi terkait KUB, khususnya PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 pada praktiknya tidak secara normatif, karena pelaksanaan KUB di Papua, khususnya Jayapura lebih mengedepankan pendekatan kultural. Tony Wanggai memberikan contoh mengenai aturan 90-60 dalam hal pembangunan rumah ibadat tidak sepenuhnya diterapkan secara kaku. Tony mencontohkan pembangunan gereja oleh denominasi tertentu sering tidak memenuhi persyaratan 90 pengguna, namun pendirian gereja tetap mendapatkan rekomendasi karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kekeluargaan. Demikian pula dalam pembangunan masjid dan mushalla lebih mengedepankan pertimbangan aspek kebutuhan umat dibandingkan penerapan aturan secara normatif.

Terkait Bab II PBM tersebut yang mengatur tugas kepala daerah dalam pemeliharaan KUB, menurut Yoel Mulait-Ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua- (wawancara, Abepura 18/03/2018) pemerintah daerah, khususnya Pemkot dan Pemkab Jayapura telah melaksanakan tugas pemeliharaan KUB didaerahnya masing-masing dengan cukup bagus. Pemkot dan Pemkab Jayapura menurut kedua tokoh tersebut cukup optimal dalam memfasilitasi terwujudnya KUB dan tugas lainnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 PBM tersebut. Pemkot dan Pemkab Jayapura cukup proaktif dalam memelihara harmoni KUB dan jika terjadi masalah cukup cepat melakukan penanganan baik dengan pendekatan struktural maupun kultural. Menurut Syamsuddin selaku Kakan Kemenag kota Jayapura (wawancara, Abepura 24/02/2018), Pemkot Jayapura dengan kemenag senantiasa menjalin koordinasi kegiatan dalam hal pemeliharaan KUB di Kota Jayapura. Koordinasi pemda dengan FKUB juga berjalan cukup optimal sebagaimana yang diakui oleh Wiliam Itaar selaku Ketua FKUB Kota Jayapura (wawancara, Jayapura 15/03/2018), mengakui pemkot dan kemenag cukup optimal memfasilitasi kinerja dan program FKUB, yang paling nyata adalah dengan memfasilitasi pengadaan bangunan kantor FKUB. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Jayapura, menurut Raldi Gulrom –Ka Sub Bag TU Kemenag Kabupaten Jayapura- (wawancara, Sentani 19/03/2018) dalam hal pembangunan rumah ibadat lebih pada pendekatan kultural, sehingga persyaratan administratif sebagaimana yang diatur dalam regulasi cenderung diabaikan. Menurut Raldi Gulrom, hampir semua rumah ibadat di Kabupaten Jayapura tidak memiliki IMB dan dalam pendiriannya tidak memerhatikan persyaratan 90-60.

Gagasan dan Praktik KUB Kelompok Islam di Jayapura

Gagasan KUB kelompok Islam

Menurut Dr. Hafid Yusuf (wawancara, Abepura 23/02/2018) perspektif kelompok Islam terhadap KUB dibangun melalui sebuah proses interaksi sosial dalam pluralitas etnik dan agama di Jayapura. Perjumpaan dalam ruang sosial yang plural tersebut dan melalui interaksi yang intensif menimbulkan kesan-kesan positif oleh umat Islam kepada umat agama lain, khususnya umat Kristen. Tampak perbedaan bagi mereka (umat Islam) yang telah lama tinggal di Jayapura, apalagi mereka yang lahir dan besar di Jayapura dengan mereka yang belum lama menetap. Mereka yang baru datang umumnya masih membawa stigma tentang Papua, namun seiring perjalanan waktu dan melalui proses interaksi yang panjang akan terbentuk kesan positif tentang interaksi dengan umat agama lain. Kesan positif tersebut membentuk perspektif tentang toleransi kepada umat agama lain, sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh mereka kepada umat Islam. Hal inilah yang membuat harmoni KUB berlangsung di Jayapura karena adanya perspektif toleransi dan harmoni pada umumnya masyarakat, khususnya umat Islam. Perspektif inilah yang membuat toleransi tertanam dalam benak dan alam bawah sadar masyarakat muslim Papua, sehingga meskipun ada riak-riak yang mencoba menyulut konflik cenderung ditanggapi dengan tenang oleh umumnya umat Islam dan tergambar pula pada sikap umat Islam yang umumnya tidak senang dengan kelompok radikal yang dianggap mereka tidak tepat dalam konteks Papua. Hal ini menurut Hafidz Yusuf yang menyebabkan kelompok Islam radikal sulit untuk berkembang di Jayapura, karena bertentangan dengan perspektif toleransi pada umumnya umat Islam. Jika pun ada kelompok Islam yang membawa perspektif radikal dalam

hal KUB umumnya mereka adalah orang yang baru datang ke Papua.

Menurut Tony Wanggai (wawancara, Jayapura 11/03/2018) umumnya perspektif kelompok-kelompok Islam terhadap KUB adalah perspektif yang moderat dengan pengecualian pada sedikit kelompok Islam yang cenderung radikal. Perspektif moderasi Islam terbangun melalui dialog dan interaksi yang terbuka dan berlangsung intensif. Gelombang kelompok "Islam baru" yang masuk pada awal 2000-an cenderung mengalami penolakan "kultural" oleh masyarakat muslim Papua, yang dalam perspektif mereka telah tertanam visi toleransi yang terbangun melalui pengalaman dan tradisi. Perspektif tentang toleransi ini merupakan modal sosio-kultural dalam membangun harmoni KUB di Jayapura.

Perspektif KUB yang dibangun oleh NU sebagaimana yang diungkapkan oleh Kahar Yelipele Ketua PC NU Kota Jayapura (wawancara, Jayapura 17/03/2018) adalah sebagaimana yang digariskan oleh NU, yaitu didasarkan pada prinsip *tasamuh* (toleransi), *tawasuth* (moderat), *i'tidal* (keadilan). Berdasarkan prinsip ini, kalangan *Nahdhiyin* akhirnya terbuka dalam hal perspektif terhadap agama lain, karena hal tersebut merupakan bagian dari ajaran *aswaja* NU. Menurut Thaha Al-Hamid dalam kapasitas sebagai tokoh NU menyatakan bahwa secara tradisi masyarakat muslim Papua adalah *nahdhiyin* dan secara perspektif KUB sinergis dengan yang digariskan oleh NU. Perspektif dan sikap moderat NU inilah yang membuat NU di Papua, khususnya di Jayapura lebih mudah diterima oleh kalangan gereja dalam dialog dan kerjasama membangun harmoni KUB.

Majelis Muslim Papua (MMP) sebagai sebuah organisasi yang menghimpun muslim asli Papua di dasarkan pada pandangan dan semangat religiusitas yang moderat untuk bersama

dengan saudara-saudara Papua lainnya yang beragama nasrani (Wanggai, 2009:213). MMP sebagaimana dituturkan oleh Thaha Al-Hamid –tokoh Muslim dan Sekjen Presidium Dewan Papua- (wawancara, Jayapura 21/03/2018) memiliki perspektif KUB yang moderat dalam bingkai visi kultural ke-Papua-an untuk hidup bersama dalam membangun Papua sebagai Tanah Damai bersama saudara-saudara Papua yang beragama Kristen dan Katolik. MMP adalah muslim dengan identitas ke-Papua-an yang memiliki visi membangun visi Papua Damai dengan mengedepankan kearifan lokal Papua "satu tungku tiga batu" sebagai basis nilai.

KUB dalam perspektif kelompok Muhammadiyah sebagaimana dituturkan oleh Prof. Partino Ketua PW Muhammadiyah Papua (wawancara, Abepura 20/03/2018) adalah dengan pendekatan dakwah kultural terhadap keragaman sosial Papua, khususnya Jayapura. Muhammadiyah memandang KUB merupakan kenyataan sosial yang harus diupayakan bersama dengan toleransi sebagai variabel pentingnya. Toleransi yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah hidup bersama secara sosial dengan tidak memasuki "lapangan teologi" masing-masing. Harmoni harus dibangun dengan beranjak dari visi yang sama untuk hidup bersama dalam kedamaian.

Kelompok Laskar Jihad sebagai kelompok yang "tertuduh" akan merusak tatanan harmoni KUB di Papua menurut Hairul (bukan nama sebenarnya), anggota Laskar Jihad (LJ) JUT (wawancara, Koya 22/03/2018) yang peneliti temui menyatakan bahwa kehadiran LJ pimpinan JUT di Papua bukanlah untuk perang, karena jihad yang dipahami tidak sekadar mengangkat senjata. Membangun peradaban melalui upaya mencerdaskan anak-anak bangsa merupakan jihad yang sesungguhnya. Dalam pandangan

LJ, toleransi sebenarnya adalah hidup bersama dengan tidak saing mengusik keyakinan dan mengganggu eksistensi masing-masing. Islam memerintahkan umatnya untuk menghormati umat agama lain selama mereka tidak mengusik kedamaian umat Islam. Jika ada upaya dari umat lain untuk mengusik kedamaian dan ketenangan hidup umat Islam, maka LJ akan bangkit yang tentu saja dimulai dengan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik KUB.

Praktik KUB kelompok Islam

Praktik KUB yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok Islam di Jayapura merupakan refleksi dari visi keislaman mereka yang moderat dan toleran. Hubungan umat Islam dengan umat beragama lainnya, khususnya dengan umat Kristen di Jayapura telah lama terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan ketika umat Kristiani merayakan Natal, umat Islam dari berbagai kelompok ikut serta terlibat dalam perayaan tersebut dengan ambil bagian dalam pengamanan gereja pada saat peringatan Natal, silaturahmi kepada tetangga dan rekan yang merayakan Natal, hingga ikut hadir baik sebagai partisipan maupun sebagai panitia dalam acara Natal bersama. Praktik KUB tersebut telah berlangsung sejak lama dan dilakukan dengan kesadaran kultural khususnya umat Islam di Jayapura.

Menurut Kahar Yelipele dan Toni Wanggai, NU setiap tahunnya selalu berpartisipasi aktif dengan melibatkan unsur Pemuda Anshor dalam rangka pengamanan peringatan Natal. Pengamanan gereja dilakukan pada saat malam dan hari Natal dalam rangka membantu kekhusyukan saudara-saudara Kristiani yang sedang beribadah dan menunjukkan komitmen pada harmoni Papua sebagai Tanah Damai. Pada saat Natal bersama atau *open house*

Natal yang diadakan baik oleh Keuskupan Jayapura, PGGS, maupun PGGP, serta denominasi gereja yang ada di Jayapura, tokoh-tokoh NU selalu hadir dalam acara tersebut. Secara personal tokoh dan warga *Nahdiyin* ikut memeriahkan Natal dengan bersilaturahmi Natal ke rumah-rumah umat Kristiani yang dalam istilah di Papua disebut "peta" atau pegang tangan (berjabat tangan). Toni Wanggai bahkan dalam kapasitas sebagai Ketua PW NU Papua kerap memberikan sambutan dalam acara Natal bersama yang diadakan oleh GKI dan dalam sambutannya ia menjelaskan tentang konsep toleransi dalam Islam serta bagaimana Alquran memuliakan Isa atau Yesus sebagai manusia suci. Pihak gereja dan tokoh-tokoh Kristen sangat mengapresiasi sambutan yang disampaikan dan membuat mereka paham tentang model Islam yang moderat.

Ketika sebagian umat Islam di daerah lain enggan bahkan untuk sekadar mengucapkan "selamat Natal" kepada umat Kristiani yang merayakannya, di Jayapura, berbagai kelompok umat Islam tidak hanya sekadar mengucapkan selamat, lebih dari itu mereka terlibat aktif dalam perayaan tersebut. Hal ini dilakukan demi komitmen menjaga persaudaraan dan kedamaian hubungan antar umat beragama di Jayapura. Dalam pengamanan Natal di gereja pemuda-pemuda muslim menurut Nurdin Sanmas Ketua Pengurus Masjid Agung al-Aqsha Sentani (wawancara, Sentani 20/03/2018) tidak sekadar mengamankan tapi mengatur parkir kendaraan dari jemaat yang sedang beribadah, tidak dibiarkan satu pun jemaat gereja yang berada di luar untuk menjaga parkir karena semua diatur oleh pemuda muslim. Keterlibatan dalam peringatan Natal dalam bentuk pengamanan Natal dengan mengerahkan pemuda-pemudanya dalam mengamankan peringatan Natal juga dilakukan oleh YAPIS, MMP, BKPRMI, dan beberapa ormas dan OKP

muslim lainnya di Jayapura. Pada bulan Desember dalam rangka menyambut Natal, ormas-ormas Islam tersebut juga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan gereja-gereja di Jayapura.

Praktik KUB dalam bidang sosial-pendidikan ditunjukkan oleh YAPIS Papua. Sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, YAPIS telah eksis di seluruh Papua hampir setengah abad. Meski berlabel Yayasan Pendidikan Islam, sekolah dan perguruan tinggi YAPIS tidak hanya dikhususkan kepada anak-anak muslim namun juga kepada seluruh anak-anak Papua apapun agamanya. Sebagaimana dituturkan Dr. M Yamin Noh Pembantu Rektor 1 Universitas YAPIS Jayapura (wawancara, Jayapura, 25/02/2020), setiap tahunnya, Universitas YAPIS Jayapura misalnya senantiasa memberikan beasiswa kepada anak-anak asli Fort Numbay untuk kuliah di kapus YAPIS Jayapura. Hal ini dilakukan oleh YAPIS sebagai bentuk apresiasi kepada penduduk asli Port Numbay dan komitmen untuk mengangkat derajat pendidikan anak-anak mereka melalui jalur pendidikan. Beasiswa prestasi yang diberikan oleh YAPIS tidak hanya diberikan kepada anak-anak muslim tapi juga kepada siswa atau mahasiswa yang berprestasi meskipun non muslim. Penerimaan YAPIS terhadap non muslim tidak hanya dengan menerima siswa atau mahasiswa, bahkan staf dan tenaga pengajar di YAPIS juga ada yang non muslim.

Selaku organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, YAPIS mengenalkan visi moderasi Islam kepada siswa atau mahasiswanya melalui kurikulum pembelajaran, khususnya pada kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). YAPIS adalah wadah pembinaan generasi muda di Papua, dan menjadi wadah pemersatu umat karena sistem PAI yang diterapkan adalah sistem PAI pembelajaran berperspektif multikultural. sehingga

peserta didik memahami dan mengenal bagaimana nilai-nilai sosial Islam yang moderat (Qahar, 2012).

Pandangan dan praktik KUB kelompok Islam dalam menyikapi konflik

Pandangan kelompok-kelompok Islam secara umum toleran dan moderat meski dengan tingkat perspektif tentang KUB yang berbeda. Moderasi tersebut tampak pada perspektif tentang cara mereka menyikapi konflik-konflik keagamaan yang terjadi, misalnya konflik terkait pembangunan menara Masjid Agung al-Aqsha Sentani dan 8 poin pernyataan sikap PGGJ. Meski muncul riak-riak di sebagian kalangan muslim, namun pendekatan dialog dan upaya-upaya persuasi baik melalui jalur kultural dan struktural dalam upaya penyelesaian masalah KUB yang terjadi tetap menjadi pilihan utama. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh ketua MUI Papua, Syaiful Islam Payage (wawancara, Jayapura, 16/03/2020) karena Islam menekankan seruan pada hidup damai berdampingan bersama dengan umat-umat yang lain dan mengedepankan cara-cara dialog dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Masih menurut Payage, di Papua kehadiran Islam radikal sangat tidak cocok dan akan memicu konflik horisontal utamanya ketika berhadapan dengan sekelompok umat Kristen Papua yang berhaluan fundamentalis. Visi Islam sebagai agama damai harus menjadi pendekatan dalam perspektif menangani konflik, sehingga konflik keagamaan yang terjadi tidak meluas dan mampu segera diselesaikan dengan jalan damai.

Penyikapan atas kasus pembangunan menara Masjid Agung al-Aqsha Sentani sangat tepat dijadikan ilustrasi, betapa perspektif dan praktik moderasi Islam tersebut tampak secara nyata. Hal ini tergambar dalam poin-poin pernyataan sikap yang dikeluarkan

oleh umat Islam baik melalui MUI Papua maupun MUI Kabupaten Jayapura. Poin-poin pernyataan sikap tersebut merepresentasikan perspektif dan praktik dari kelompok-kelompok Islam umumnya di Jayapura dalam menyikapi permasalahan dengan umat lain.

Pengaruh Konteks Sosial, Budaya, Politik, dan Ekonomi dalam Membangun Perspektif dan Praktik KUB Kelompok-kelompok Islam di Jayapura

Interaksi sosial dan budaya antar berbagai suku dan agama di Jayapura, khususnya antara pendatang yang beragama Islam dan masyarakat asli yang beragama Kristiani melahirkan pembauran kultural dan secara evolutif membentuk sebuah kultur baru dari interaksi tersebut. Agama dan adat bersama pemerintah dalam kearifan lokal Papua diposisikan sangat strategis dalam filosofi "satu tungku tiga batu". Pilar kultural inilah yang mewarnai terbentuknya perspektif dan praktik moderat dalam membangun harmoni KUB. Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat strategis dalam membangun harmoni KUB termasuk dalam hal penyelesaian konflik.

Sebagaimana dikatakan oleh Afwan (2015) ada kesamaan nilai dari karakter cultural suku-suku di Papua, yaitu persaudaraan. Melalui semangat persaudaraan ini kultur Papua memiliki mekanisme memperoleh jalan keluar secara damai dari konflik maupun membangun harmoni dalam kemajemukan. Di Kabupaten Jayapura ada filosofi *Kenambai Umbai* (Satu hati, utuh ceria, berkarya, meraih kejayaan) dan di Kota Jayapura ada filosofi *Hen tecahi yo onomi t'mar ni hanased* (Bersatu membangun kota demi kemuliaan nama Tuhan). Kedua kearifan lokal tersebut menjadi motto kabupaten dan Kota Jayapura. Secara struktural dan

kultural pemerintah bersama tokoh adat dan tokoh agama menjadikan kearifan lokal tersebut sebagai instrumen sosial dalam membangun harmoni KUB dan sebagai instrumen dalam penyelesaian konflik, hal inilah yang membuat ketika ada konflik KUB bisa cepat diselesaikan secara damai. Contoh yang paling nyata adalah ketika penyelesaian konflik terkait pembangunan menara Masjid Agung al-Aqsha Sentani dirumuskan poin-poin perdamaian dengan mengambil dasar dari filosofi *Kenambai Umbai*.

Konteks politik sangat berperan dalam membangun harmoni KUB termasuk dalam membentuk perspektif dan praktik KUB di kalangan kelompok muslim. Secara politik umat Islam memperoleh representasi baik di Kota maupun Kabupaten Jayapura. Di kedua daerah tersebut posisi wakil bupati/walikota adalah seorang muslim, di Kabupaten Jayapura wakil bupati adalah Jawa-Muslim dan di Kota Jayapura wakil walikota adalah Bugis-Muslim. Representasi ini juga tersebar dalam jabatan-jabatan strategis di jajaran Pemkot dan Pemkab Jayapura demikian pula representasi dalam kursi legislatif. Keadilan representatif ini mengkonstruksi perspektif dan membentuk sikap praktik untuk menjaga kestabilan harmoni KUB, karena umat Islam, meskipun didominasi oleh pendatang tetap berkepentingan untuk menjaga harmoni tersebut, khususnya dari kalangan elit-elit muslim yang mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan.

Faktor ekonomi juga penting untuk dilihat dalam membentuk perspektif dan praktik KUB oleh kelompok Islam di Jayapura. Umat Islam adalah mayoritas sebagai penduduk pendatang dari luar Papua yang datang untuk mencari penghidupan. Kebanyakan pendatang, khususnya dari Jawa maupun Sulawesi bekerja dalam sektor ekonomi, meskipun sudah banyak juga yang bekerja

sebagai ASN. Sektor ekonomi mikro cukup dikuasai oleh etnis pendatang yang umumnya beragama Islam tak sedikit diantaranya telah mendapatkan kemapanan hidup di Jayapura. Hal inilah yang membuat umat Islam merasa sangat berkepentingan dengan harmoni sosial, khususnya harmoni KUB di Jayapura.

Interaksi yang intensif dalam keragaman membentuk perspektif dan praktik moderasi kelompok-kelompok Islam dalam membangun harmoni KUB di Jayapura. Dengan menggunakan matra toleransi Walzer, model kerukunan yang ditunjukkan dalam perspektif dan melalui praktik KUB oleh kelompok Islam berada dalam kisaran matra ketiga hingga kelima. Perspektif dan praktik KUB ditunjukkan dengan muncul pengakuan secara prinsip bahwa sang *liyan* punya hak-hak sendiri walau belum tentu ekspresinya disetujui (contoh pada Muhammadiyah). Pada sebagian kelompok Islam lainnya, toleransi tidak hanya sebatas memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain, atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang *liyan* (contoh pada MMP). Pada kelompok NU dan YAPIS, toleransi bukan lagi sekadar pengakuan dan keterbukaan menerima yang lain, tetapi juga ikut mendukung, merawat dan merayakan perbedaan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, perspektif dan praktik KUB yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok Islam di Jayapura dapat dijadikan *role of model* KUB bagi kelompok-kelompok Islam yang ada di daerah lain. Yaitu, membangun perspektif yang moderat dan praktik-praktik yang inklusif dalam membangun hubungan dengan umat agama lain. Sehingga interaksi sosial dan budaya antar berbagai kelompok agama dapat terjalin secara harmonis dalam spirit yang damai dalam membangun sinergi dalam keragaman. Prinsip moderasi Islam merupakan refleksi dari

visi Islam sebagai *rahmatan lil alamin* yang diejawantahkan dalam sikap *tasamuh* (toleran) dan *tawasuth* (moderat). Hal ini ditunjukkan dengan pendekatan dengan menempuh mekanisme kultural melalui dialog dalam menyelesaikan permasalahan hubungan antar umat beragama.

SIMPULAN

Persepsi kelompok-kelompok Islam tentang KUB dibangun melalui sebuah proses interaksi sosial dalam pluralitas etnik dan agama di Jayapura. Perjumpaan dalam ruang sosial yang plural tersebut dan melalui interaksi yang intensif menimbulkan kesan-kesan positif oleh umat Islam kepada umat agama lain, khususnya umat Kristiani. Prinsip dasar yang membangun perspektif KUB dari kelompok-kelompok Islam tersebut adalah prinsip moderasi dan inklusivisme Islam dalam membangun interaksi dengan penganut agama lain yang sesuai dengan visi Islam sebagai agama *Rahmatan lil alamin*. Karena terbangunnya perspektif moderat inilah, gelombang kelompok intoleran yang masuk mulai awal 2000-an cenderung mengalami penolakan "kultural" oleh masyarakat muslim.

Praktik KUB yang ditampilkan oleh kelompok-kelompok Islam di Jayapura merupakan refleksi dari visi keislaman mereka yang moderat dan toleran. Hubungan umat Islam dengan umat beragama lainnya telah lama terjalin dengan baik. Hal ini ditunjukkan ketika umat Kristiani merayakan Natal, umat Islam dari berbagai kelompok ikut serta terlibat dalam perayaan tersebut dengan ambil bagian dalam pengamanan gereja pada saat peringatan Natal, silaturahmi kepada tetangga dan rekan yang merayakan Natal, hingga ikut hadir baik sebagai partisipan maupun sebagai panitia dalam acara Natal bersama. Praktik KUB

tersebut telah berlangsung sejak lama dan dilakukan dengan kesadaran kultural khususnya umat Islam di Jayapura.

Terbangunnya karakter moderasi Islam dalam perspektif dan praktik KUB oleh kelompok-kelompok Islam di Jayapura sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat Islam di Jayapura. Konteks sosial sebagai minoritas dan pendatang, berpengaruh dalam membentuk karakter moderat umat Islam di Jayapura. Interaksi sosial yang intensif dengan umat Kristiani dan penduduk asli Papua secara kultural membentuk karakter moderat dalam perspektif dan praktik KUB oleh kelompok-kelompok muslim. Politik representasi dan distribusi yang adil dan *political will* pemerintah daerah dalam membangun harmoni KUB memperkuat kepercayaan umat Islam

kepada pemerintah daerah, sehingga penyelesaian konflik dengan cara-cara damai melalui pendekatan dialog lebih mudah diterima oleh kelompok-kelompok Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi bagi penelitian ini. Terkhusus kepada Kepala Balai Litbang Agama Makassar yang telah menugaskan peneliti untuk melakukan penelitian di Jayapura. Terima kasih pula peneliti ucapkan kepada segenap jajaran Kementerian Agama Kota dan Kabupaten Jayapura. Pengurus ormas Islam dan tokoh agama di Jayapura yang telah membantu memberikan sumbangsih data bagi penelitian ini.

DAFTAR ACUAN

- Afwan, Budi Asyhari. (2015). *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal Untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Yogyakarta: CRCS.
- Fadl, Khalid Abou. (2003). *Cita dan Fakta Toleransi Islam*. Bandung: Arasy.
- Fauzi, Ihsan Ali. (2007). *Demi Toleransi Demi Pluralisme*. Jakarta: Paramadina.
- Iskandar, Jusman. (2005). *Dinamika Kelompok Organisasi dan Konstruksi Sosial*. Bandung: Puspaga.
- Kasniyah, Naniek. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mashadi. (2014). "Pendidikan Keagamaan sebagai Basis Kearifan Lokal (Gagasan Kerukunan Umat Beragama)." *Tarbiyah* 2 (1): 47–66.
- Melerey, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas.
- Muchtar, Ibnu Hasan. (2013). "Peran Kelompok Keagamaan Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Argantga, Petang, Badung, Bali)." *Harmoni* 12 (3): 136–52.
- Muhdina, Darwis. (2015). "Kerukunan Umat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Kota Makassar." *Diskursus Islam* 3 (1): 20–36.
- Qahar, Abdul. (2012). "Pendidikan Agama Islam Berbasis Kemajemukan di SMA Hikmah YAPIS Kota Jayapura." Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ridwan. (2018). "Religion and Peacebuilding: A Preliminary Study on Transnational Islam and Communal Harmony in Papua." *Harmoni* 17 (2): 555–69.
- Sabara. (2016). "Penyuluh Inklusif: Upaya Membangun Harmoni Pasca Konflik di Maluku Tengah." *Al-Qalam* 22 (1): 303–13.
- — —. (2018). "Kiprah Setengah Abad Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Papua: Membangun Harmoni Beragama Melalui Dunia Pendidikan." *Al-Qalam* 24 (1): 65–72.
- Wally, John Manangsang. (2018). *Dunia Dalam Genggaman Papua: Sebuah Fenomena Geo-Politik Global*. Jakarta: Yayasan Grafia Papua.
- Wanggai, Toni Viktor Mandawiri. (2009). *Rekonstruksi Sejarah Sosial Umat Islam di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.